

**KETIKA TARIF EKSPOR BERLAKU: PANDANGAN ISLAM ATAS
DAMPAKNYA DI NTB**

Muhammad Masruron¹, Salwa Hayati²

¹Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

²Universitas Islam Negeri Mataram

Corresponding Author: muhammadmasruron@iaihnwpancor.ac.id

ABSTRAK

Penerapan tarif ekspor terhadap komoditas unggulan di Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti hasil pertanian, perikanan dan tambang, menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan tarif ekspor dari perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh data yang sudah di publish Badan Pusat Statistik di Nusa Tenggara Barat adapun sampel dalam penelitian ini yaitu data triwulan I pertama periode Januari-April dan April 2025. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif ekspor di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak memberikan dampak yang signifikan di daerah hal ini disebabkan pertama, negara tujuan utama ekspor NTB pada kuartal I didominasi oleh negara Tiongkok yang menjadi mitra dagang strategis. kedua, struktur ekonomi NTB yang berbasis sumber daya alam primer seperti pertanian, perikanan dan tambang membuat ekspor daerah kurang responsif terhadap kebijakan tarif. Dalam konteks ekonomi Islam para pemangku kebijakan hendaknya memperhatikan kemaslahatan dan fokus dengan pola prinsip maqāṣid al-syarī'ah dengan selalu, menjaga Harta (hifzh al-mal), menjaga jiwa dan kelangsungan hidup rakyat (hifzh an-nafs) serta mewujudkan keadilan ('adl).

Kata Kunci: Tarif Ekspor, Maqasid Al-Syariah, Masalah

1. PENDAHULUAN

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam hayati adalah Nusa Tenggara Barat, potensi yang dimiliki cukup besar misalnya dalam sektor pertanian, perikanan dan pertambangan. Komoditas lain yang dimiliki juga seperti jagung, rumput laut dan hasil tambang emas menjadi andalan ekspor daerah ini, hal ini dapat mendorong pendapatan masyarakat lokal. Saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami pasang surut di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan dampaknya terhadap negara-negara di dunia tak terkecuali di Indonesia.

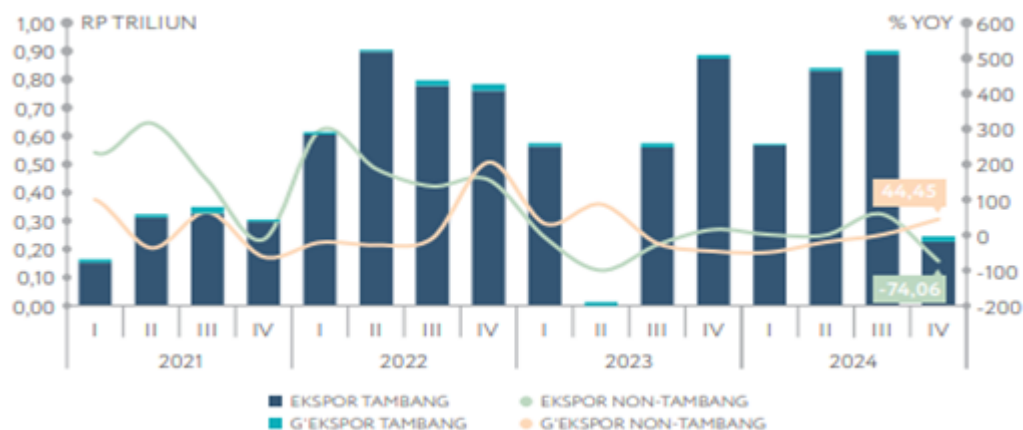
Penerapan pajak ekspor terhadap suatu produk di Negara pengekspor dengan asumsi negara besar menyebabkan penurunan harga produk domestik, peningkatan biaya ekspor, naiknya konsumsi domestik, penurunan produksi domestik sehingga volume ekspor barang

dan adanya penerimaan pemerintah dari pajak. (Sinuraya et al., 2018). Tarif impor biasanya dihubungkan dengan proteksionisme, yakni kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antarnegara. (Maharani Tristi et al., 2021)

Studi lain juga menjelaskan bahwa dampak peningkatan tarif memang menimbulkan kemungkinan yang membahayakan kesinambungan industri tekstil Indonesia seperti prediksi terjadinya pengangguran yang signifikan dalam pendapatan ekspor karena penurunan pesanan dari merek internasional, tingkat pemutusan hubungan kerja yang lebih tinggi, perubahan nilai rupiah yang lebih rendah karena penurunan yang signifikan dalam inflasi impor dan pendapatan ekspor. Dampak lebih lanjut seperti peningkatan kemiskinan, permintaan domestik yang terbatas dan resiko kebangkrutan bagi perusahaan industri (Nehemia Rachel et al., 2025)

Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat memicu kontraksi terhadap perlambatan ekonomi global. Saat ini tercatat nilai ekspor pada di provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi penurunan sebesar 56,95 persen jika dibandingkan dengan jumlah ekspor pada bulan september 2024 nilai ekspor sebesar US\$ 244.143.894 mengalami penurunan di bulan oktober 2024 sebesar US\$ 105.102. 437. Demikian halnya pada Ekspor Barang dan jasa pada triwulan IV 2024 terjadi kontraksi sebesar -41,43% (yoy) setelah tumbuh 14,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini diakibatkan oleh ekspor tambang yang mengalami kontraksi di sebabkan turunnya target ekspor guna pengisian inventori untuk kebutuhan smelter. Pada kuartal IV tahun 2024 ekspor tambang mengalami kontraksi sebesar -74,06% (Yoy), terjadi penurunan dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 58,44%.

Grafik 1. Perkembangan Ekspor



Sumber: BPS Provinsi NTB diolah

Kebijakan tarif ekspor menimbulkan pro dan kontra termasuk ditingkat daerah seperti misalnya di Nusa Tenggara Barat. Bagi masyarakat kecil pelaku usaha dan para petani lokal, dianggap sebagai bentuk biaya atas pendapatan mereka. Disisi lain pemerintah beranggapan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga kestabilan harga, kedaulatan pangan nasional dan menciptakan value added bagi negara. Penurunan ekspor ke Amerika Serikat berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional serta dampak pada sektor ketenagakerjaan, khususnya di industri padat karya. Diproyeksi berpotensi akan terjadi pemutusan lapangan

pekerjaan sebanyak 191.000 pekerja di sektor tekstil dan produk tekstil. Disamping itu juga berdampak pada sektor minyak hewani dan nabati kehilangan pekerjaan sebanyak 28.000 orang. (Pratama & Ginting, 2025).

Kesenjangan antara kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi topik penting untuk mencari problem solving dari perspektif keadilan distribusi dan keberpihakan pada kalangan masyarakat menengah kebawah. Urgensinya perdagangan pada tingkat dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan saling melakukan pertukaran dagang dalam hal-hal yang bermanfaat. Untuk meninjau perdagangan ekspor-impor Indonesia dari perspektif ekonomi Islam, pentingnya pertukaran barang dan jasa global ditekankan sebagai sarana memenuhi kebutuhan manusia sambil mematuhi prinsip syariah (Maylani et al., 2024)

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip tauhid (keesaan Allah), Khilafah (amanah pengelolaan sumber daya), dan Maslahah (kesejahteraan umum). Menurut al-Qur'an dan sunnah, kekayaan itu hak mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia bertindak sebagai pengelola yang harus mendistribusikan secara adil. (Fitri et al., n.d.)

Dalam perspektif ekonomi Islam fokus utama pada kebijakan publik seharusnya berorientasi pada prinsip keadilan ('adl) kemaslahatan (maslahah), dan larangan terhadap kezaliman atau keberpihakan pada golongan tertentu. Dalam konteks tarif, Islam memberikan pandangan tentang keniscayaan dalam keadilan distribusi. Islam tidak mendukung prinsip keadilan buta. Kerenanya, seorang muslim yang tengah berusaha keluar dari situasi yang menindas lebih membutuhkan bantuan di banding orang yang sekedar menuntut hak sebagian kekayaan dari orang-orang kaya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode deskriptif merupakan jenis penelitian dengan suatu rumusan masalah yang mamadu kuantitatif dengan rumusan masalah yang mamadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh luas dan mendalam. (Abigail Soesana et al., 2023). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga mbermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama tentang sebuah penelitian (Abdullah et al., 2021) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data skunder berupa hasil publikasi Badan Pusat statistik Nusa tenggara barat dan dokumen lain sebagai pendukung.

Populasi dalam penelitian ini data statistik yang sudah di publish Badan Pusat Statisti di Nusa tenggara Barat. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu data triwulan I pertama priode Januari-April dan April 2025. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga yang berpengaruh dalam penelitian, buku pustaka dan sebagainya. Data lain dalam penelitian ini juga diambil dari beberapa artikel jurnal, situs publikasi pemerintah, buku, catatan internal sebuah perusahaan/organisasi serta sumber lainnya. (Abigail Soesana et al.,

2023) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa statistik deskriptif yaitu menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2012)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dampak kebijakan tarif nilai ekspor

Salah satu negara yang kena imbas dari kebijakan presiden AS Donald Trump yaitu Indonesia dikenakan tarif resiprosal atau tarif timbal balik tinggi sebesar 32%. Amerika Serikat mengenakan tarif ini atas timbal balik dari tarif yang dikenakan oleh Indonesia kepada produk-produk Amerika Serikat sebesar 64%. (Andry Satrio Nugroho et al., 2025)

Tabel 1. Besaran Tarif Resiprosal Yang Dikenakan Amerika Serikat Kepada Berbagai Negara

No	Negara	Tarif yang dikenakan ke AS	Tarif resiprosal AS yang didiskon
1	Kamboja	97%	49%
2	Laos	95%	48%
3	Vietnam	90%	46%
4	Sri Lanka	88%	44%
5	Bangladesh	74%	37%
6	Thailand	72%	36%
7	China	67%	32%
8	Indonesia	36%	32%

Sumber: Data Primer diolah dari INDEF 7 April 2025

Negara Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia pada tahun 2024 dengan nilai 26,36 miliar dolar AS berada dibawah posisi China. Dengan pemberlakuan tarif baru dari AS, Risiko utama dari Indonesia adanya tekanan daya saing produk yang banyak dijual ke pasar tersebut, terutama sektor-sektor yang rawan beban tarif tambahan. (Andry Satrio Nugroho et al., 2025)

Namun secara regional posisi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyumbang dari Pemberlakuan tarif Amerika Serikat tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat bukan sebagai negara tujuan ekspor yang utama melainkan Tiongkok, Taiwan dan Amerika Serikat. Adapun untuk ekspor tujuan ke Amerika Serikat merupakan negara kedua komoditas kelompok ikan dan udang. Selain itu pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tujuan ke Amerika Serikat bukan sebagai penyumbang utama ekspor. Namun Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih melakukan ekspansi pasar dan diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan satu negara tujuan ekspor. (BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 2025)

**Tabel 2. Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Negara Tujuan
Januari-April 2025**

No	Negara Tujuan	Januari-April 2025		Negara Tujuan	April 2025	
		Nilai (US\$)	%		Nilai (US\$)	%
1	Tiongkok	31.628.886	56,07	Tiongkok	30.906.202	79,03
2	Amerika Serikat	9.215.678	16,34	Taiwan	3.595.317	9,19
3	Taiwan	3.619.851	6,42	Amerika Serikat	1.779.785	4,55
4	Malaysia	2.181.144	3,87	Australia	933.456	2,39
5	Hongkong	2.033.885	3,61	Thailand	909.581	2,33

Sumber : Data primer di olah dari BPS Prov. NTB tahun 2025

Dari data diatas diketahui bahwa negara tujuan ekspor pada bulan januari-april tahun 2025 yaitu negara tiongkok sebagai negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar yaitu US\$ 31.628.886 atau sekitar 56,07 persen. Adapun negara tertinggi kedua adalah negara amerika serikat dengan nilai US\$ 9.215.678 atau sekitar 16,34 persen, kemudian dilanjutkan oleh negara taiwan sebesar US\$ 3.619.851 atau sekitar 6,42 persen sedangkan pada posisi keempat dan kelima disusul oleh negara Malaysia dan Hongkong dengan nilai masing-masing sebesar US\$ 2.181.144 atau sekitar 3,87 persen dan US\$ 2.033.885 atau sekitar 3,61 persen.

Selanjutnya pada bulan April tercatat bahwa Negara Tiongkok masih menjadi tujuan utama Ekspor dengan nilai terbesar yakni US\$ 30.906.202 atau sekitar 79,03 persen, kemudian disusul negara Taiwan kedua tertinggi dengan nilai ekspor sebesar US\$ 3.595.317 atau sekitar 9,19 persen, selanjutnya amerika serikat negara ketiga tertinggi dengan nilai ekspor sebesar 1.779.785 atau sekitar 4,55 persen. sedangkan pada posisi keempat dan kelima disusul oleh negara Australia dan Thailand dengan nilai masing-masing sebesar US\$ 933.456 atau sekitar 2,39 persen dan US\$ 909.581 atau sekitar 2,33 persen.

Oleh karena itu fokus utama tujuan ekspor di NTB yakni Pasar Asia dan Afrika, dinilai cocok dengan karakteristik produk NTB dan memiliki potensi yang besar dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. (BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 2025) Berikut ini grafik pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2024 hingga triwulan pertama tahun 2025 sebagai berikut:

**Grafik 2. Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekspor
di Provinsi NTB**



Sumber: BPS Provinsi NTB diolah

Nilai ekspor nusa tenggara barat pada bulan junuari-april 2025 mencpat US\$56,41 juta atau turun 93,79 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Adapun nilai ekspor bulan april 2025 mencapai US\$39,11 persen atau turun 88,34 persen dibandingkan ekspor bulan april 2024. Sementara itu negara tujuan utama ekspor terbesar ke tiongkok (79,03 persen), taiwan (9,19 persen), amerika serikat (4,55 persen), australia (2,39 persen), thailand (2,33 persen) dan lainnya 2, 51 persen

**Tabel 3. Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat
Menurut Golongan Barang, Januari-April 2025**

HS2	Kelompok komoditas	Januari-April 2025		April 2025	
		Nilai (US\$)	%	Nilai (US\$)	%
74	Tembaga	35,156,065	62.32	35.156.065	89.90
03	Ikan dan udang	7,238,182	12.83	1.620.498	4.14
71	Perhiasan/permata	4,933,692	8.75	1.578.008	4.04
16	Daging dan ikan olahan	3,973,250	7.04	407.745.	1.04
25	Garam belerang, kapur	749,989	1.33	55.130	0.14

Sumber : Data primer di olah dari BPS Prov. NTB tahun 2025

Dari tabel diatas di jelaskan bahwa Jenis komoditas ekspor tertinggi di provinsi NTB bulan april 2025 adalah tembaga sebesar US\$35.156.065 (89,90 persen), ikan dan udang sebesar US\$1.620.498 (4,14 persen), perhiasan/permata sebesar US\$ 1.578.008 (4,04 persen), daging dan ikan olahan sebesar US\$ 407.745 (1,04 persen), garam, belerang, kapur sebesar US\$ 156.982 (0,40 persen).(BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 2025) Pembelakuan tarif impor oleh amerika serikat merupakan langkah proteksionis yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan global dianggap tidak adil atau merugikan, mesti strategi ini mungkin memberi dampak dalam jangka pendek bagi sektor dalam negeri namun memberikan konsekuensi baik ditingkat domestik maupun mancanegara. Di dalam negeri sendiri, tarif impor dapat memberikan perlindungan bagi produsen lokal termasuk di indonesia, dengan kenaikan harga barang impor produk dalam negeri lebih kompetitif. Akan tetapi implikasi dari kenaikan harga bagi konsumen, yang harus membayar lebih mahal untuk barang-barang sebelumnya lebih murah karena impor. Akibatnya daya beli masyarakat bisa menurun dan menyebabkan terjadinya inflasi.

Menurut laporan Badan pusat statistik Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa impor NTB mengalami penurunan signifikan pada bulan februari 2025 tercatat sebesar US\$ 13,82 Juta turun 63,73 persen dibanding januari 2025 yang mencapai US\$ 38,12 juta. Berbeda halnya dengan ekspor NTB justru mengalami peningkatan Februari 2025 nilai ekspor mencapai US\$ 7,28 juta meningkat 87,17 persen dibanding bulan sebelumnya. Demikian pula dibandingkan degan feruari 2024, ekspor NTB justru mengalami penurunan drastis hingga 96,84 persen. (SUARANTB.com, 2025)

Disisi lain, sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor juga dapat terdampak negatif. Kenaikan biaya poduksi akibat tarif dapat menurunkan efesiensi dan daya saing industri hilir, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan. Dengan demikian secara global dampak pemberlakuan tarif impor oleh AS dapat memicu ketegangan dagang dengan negara mitra. Negara yang terkena dampak bisa membalas dengan menaikkan tarif balasan, sehingga terjadi perang dagang. Kondisi ini tentu dapat mengganggu stabilitas ekonomi global dan memperlemah sistem perdagangan multilateral yang telah dibangun melalui *World Trade Organization* (WTO).

Dalam kasus industri di Nusa Tenggara Barat industri pengolahan atau manufaktur yang mengandalkan bahan baku atau komponen impor masih sangat terbatas. Akibatnya, fluktuasi tarif impor barang dari luar negeri tidak terlalu memengaruhi struktur biaya produksi lokal.

Bagi negara berkembang, yang baru memulai kegiatan ekspor dalam sektor industri tentu membutuhkan bahan mentah dari luar negeri termasuk sumber daya manusia terampil yang pada gilirannya membutuhkan perhatian pemerintah lebih serius.

Dalam sektor industri misalnya, industri yang baru tumbuh didalam negeri (infant Industry) umumnya masih dengan teknologi yang sederhana serta belum mencapai skala ekonomi (*economy of scale*) atau efisiensi masih rendah selalu kalah bersaing dengan industri luar negeri yang sudah memiliki teknologi maju efisiensi yang tinggi. Akibatnya dari keadaan ini maka industri dalam negeri perlu dilindungi (proteksi) melalui pengenaan tarif atas komoditas impor.

b. Pandangan Islam Ketika Tarif Ekspor Dan Dampaknya Di NTB

1. konsep masalah dalam maqhosid syariah

Islam memberikan pandangan bahwa tarif impor secara eksplisit tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadist namun dijelaskan oleh para ulama dan ekonomi muslim dengan pendekatan ijtihad (ushul fiqh) bahwa tarif impor dibolehkan asalkan adil dan tidak terjadi kezaliman atau eksploitasi. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

"tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai secara zalim (mukus)"
(HR. Ahmad, Abu Dawud dan Hakim)

Mukus dimaksudkan disini yaitu pungutan liar atau pajak yang tidak sah menurut syariat atau tidak adil. Islam sendiri menilai bahwa tarif impor hendaknya sesuai maqoshid syariah seperti :

a. Menjaga Harta (hifzh al-mal)

Negara diperbolehkan mengambil tarif jika itu kepentingannya menjamin ekonomi lokal atau domestik ketika terjadi ancaman dari asing. Implementasi dari perlindungan harta (hifdz al-mal) adalah lahirnya kebijakan ekonomi yang berkeadilan (Fadilah, 2025).

b. Menjaga jiwa dan kelangsungan hidup rakyat (hifzh an-nafs)

Jika kenaikan tarif impor itu bertujuan untuk menjaga dan melindungi lapangan kerja dalam negeri termasuk produksi dalam negeri maka hal ini

dianggap sah

c. Mewujudkan keadilan ('adl)

Pemberlakuan tarif impor hendaknya adil dan transparan, tidak membaratkan daya beli konsumen atau pelaku usaha. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah (al-'adl) menghendaki agar perdagangan berlangsung dengan proporsional dan tidak menzalimi pihak manapun. Jika tarif terlalu tinggi dikenakan sepihak oleh negara maju, itu termasuk bentuk ketimpangan (*dzulm*) yang tidak dibenarkan dalam islam. (Toyyibi & Mawardi, 2025)

Jika suatu negara memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global, maka segala kebijakan ekonomi, moneter, maupun perdagangan yang diambil oleh negara tersebut dapat menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lain, khususnya negara berkembang. Negara berkembang umumnya masih dalam tahap transisi ekonomi dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara maju, baik dalam hal investasi, teknologi, perdagangan internasional, maupun bantuan ekonomi.

Ketergantungan ini membuat negara berkembang rentan terhadap fluktuasi global yang dipicu oleh kebijakan negara-negara besar. Misalnya, perubahan suku bunga oleh bank sentral di negara maju dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang, melemahkan mata uang lokal, dan meningkatkan beban utang luar negeri. Demikian pula, kebijakan proteksionisme atau perubahan tarif impor di negara kuat dapat membatasi akses pasar bagi produk ekspor negara berkembang, mengganggu pendapatan nasional dan memperlambat pembangunan.

Namun dikonteks regional seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dampak kebijakan tarif impor ini cenderung tidak signifikan atau bahkan nyaris tidak terasa secara langsung. Hal ini dikarenakan NTB memiliki struktur ekonomi berbasis sumber daya Alam masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian, peternakan perikanan dan pertambangan. Sebagian besar kegiatan ekonominya berbasis produksi domestik, bukan industri pengolahan atau perdagangan barangan jadi yang padat impor.

Oleh karena itu, stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi global perlu dijaga. Negara berkembang harus diberikan ruang dan dukungan untuk membangun kemandirian ekonominya, termasuk melalui kebijakan perdagangan yang adil, akses terhadap teknologi, dan perlindungan dari praktik ekonomi global yang eksploitatif. Di sisi lain, negara berkembang juga perlu memperkuat ketahanan ekonominya sendiri, mengurangi ketergantungan yang berlebihan, dan membangun sistem ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Melindungi kepentingan ekonomi negara berkembang bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka sendiri, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif dalam

menciptakan tatanan ekonomi dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua negara.

2. Konsep masalah dalam tarif

masalah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqāsid al-syarī'ah. Keberpihakan masalah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi masalah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak (Safriadi & Hi, 2021)

Dalam konteks kemaslahatan pendapat oleh Husen Hamid Hasan menyatakan masalah ialah perbuatan yang mengandung kebaikan yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia sebagai contohnya bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung manfaat dan hidup hajat orang banyak.

Selanjutnya imam al-ghazali mengatakan bahwa yang masalah merupakan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sedangkan menurut al-syatibi menyatakan bahwa sesuatu yang difahami untuk memiliharnya sebagai hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang bukan didasarkan pada kondisi tertentu pada penemuan akan secara pribadi (Agus Hermanto, 2022) Apa yang dilakukan oleh Donald Trump Presiden Amerika Serikat terhadap negara- negara diseluruh dunia melalui pemberlakuan tarif, jika hanya didasarkan pada kepentingan satu wilayah saja dan tidak mempertimbangkan kepentingan bersama beberapa negara, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi umat, maka ini termasuk kategori *mufسادah* (kerusakan). Terlebih lagi, hal itu dilakukan berdasarkan pemikiran pribadi, bukan merupakan kebijakan resmi dari pemerintah atau negara. Akibatnya tindakan tersebut justru dapat berdampak negatif terhadap negara-negara lain, hingga menyebabkan terhambatnya perkembangan atau petumbuhan ekonomi mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas pemberlakuan tarif kepada indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara barat dapat disimpulkan bahwa provinsi NTB NTB memiliki struktur ekonomi berbasis sumber daya Alam masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian, peternakan perikanan dan pertambangan. Sebagian besar kegiatan ekonominya berbasis produksi domestik, bukan industri pengolahan atau perdagangan barang jadi yang padat impor. Oleh sebab itu pemberlakuan tarif dirasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kebijakan tarif ekspor yang diterapkan negara Amerika serikat belum sesuai dengan prinsip

Maqāṣid al-Syari'ah dan kemaslahatan. Tarif mestinya dirancang secara adil, tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional atau eksploitasi. Kebijakan perlu mempertimbangkan kesejahteraan semua pelaku, dari lokal maupun global.

Tarif harus adil, tidak menimbulkan kesenjangan antar negara atau penderitaan kelompok tertentu, pendampingan terhadap masyarakat kecil yang terkena dampak tarif perlu menjadi perhatian pemerintah. Perlu ada studi lanjut yang kajian mendalam untuk ekspor ke wilayah prioritas ke luar negeri seperti china, amerika serikat,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. K., Hi, S., Jannah, M., Pd, M., Aiman, U., Pd, S., Hasda, S., Pd, M., Fadilla, Z., Taqwin, N., Kep, S., Kes, M., & Saputra, N. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*.
- Abigail Soesana, Hani Subakti, Karwanto, & Anisa Fitri. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Agus Hermanto. (2022). *Maqashid Syariah: Metode Subtantif Menuju Hukum Keluarga Baru*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Andry Satrio Nugroho, Ahmad Heri Firdaus, Dzulfian Syarifan, & Ariyo D. P. Irhamna. (2025, April 7). *INDEF. Manufacturing, Investment, and Trade Update*.
- BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. (2025). *Perkembangan Ekspor dan Impor Nusa Tenggara Barat, April 2025* (No. 36/06/52/Th. XIV, 2 Juni 2025). BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- Fadilah, D. (2025). *Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal*.
- Fitri, K., Sinka, V., & Hasibuan, R. R. A. (n.d.). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia*.
- Maharani Tristi, Harianto, H., & Rifin, A. (2021). Dampak Kebijakan Tarif dan Non-tarif Negara-Negara Importir atas Ekspor Tuna Olahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(3), 468–478. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.3.468>
- Maylani, P., Nita, T. W., & Nurjannah. (2024). TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP EKSPOR-IMPOR SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA INDONESIA. *JEI : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 13–24. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v2i2.410>
- Nehemia Rachel, Malfa Hanifa, Maria Arista Mogi, Seftya Dwiwayan Putri, & Shakila Salsabila. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Impor Amerika Serikat terhadap Ekspor Industri Tekstil di Indonesia. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(2), 239–256. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4930>
- Pratama, R. A. Z., & Ginting, A. M. (2025). *DAMPAK KENAIKAN TARIF IMPOR AS TERHADAP INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG BARU*.
- Safriadi, T., & Hi, S. (2021). *Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*.

- Sinuraya, J. F., Sinaga, B. M., Oktaviani, R., & Hutabarat, B. (2018). Dampak Kebijakan Pajak Ekspor dan Tarif Impor terhadap Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Kakao di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 35(1), 11. <https://doi.org/10.21082/jae.v35n1.2017.11-31>
- SUARANTB.com. (2025, March 18). *Impor NTB Menurun Tajam, Ekspor Mengalami Kenaikan* [Online post]. <https://suarantb.com/2025/03/18/impor-ntb-menurun-tajam-ekspor-mengalami-kenaikan/>
- Sugiyono. (2012). . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Toyyibi, A. M., & Mawardi, I. (2025). *TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF EKSPOR AMERIKA SERIKA*. 3(2).